

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-Undang RI no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam wujud Otonomi Daerah tersebut, pemerintah pusat menetapkan agar pemerintah daerah dalam upaya pembangunan di wilayah tersebut melalui sektor kepariwisataan. Sebagaimana yang dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang mengamanatkan agar : (1) Sumber daya alam menjadi modal kepariwisataan, dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan untuk meningkatkan pendapatan nasional; (2) Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan; (3) Mendorong pembangunan kepariwisataan daerah; dan (4) Memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi.

Keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan kunjungan wisatawan tidak terlepas juga dari peran 3 (tiga) aktor penting dalam pariwisata yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga komponen tersebut sangatlah penting dalam pengembangan pariwisata dan diharapkan dapat berkoordinasi dengan baik. Hal

ini bertujuan agar proses pengembangan dan pembangunan pariwisata tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja (Bambar, Anom: 2016).

Dalam berbicara pariwisata, terdapat potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut agar dimanfaatkan oleh daerah dan masyarakat setempat. Potensi yang dimiliki diharapkan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat, namun hal tersebut dapat terwujud apabila masyarakat berpartisipasi dalam memanfaatkan segala potensi wisata yang ada. Wisatawan pada umumnya membutuhkan jasa angkutan, peristirahatan, minuman dan cindra mata. Dengan demikian masyarakat mendapatkan peluang kerja, kesempatan berpartisipasi dan mengambil manfaat darinya, namun ketersediaan sumber daya alam menjadi sia-sia dan tidak berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian bagi suatu daerah dan masyarakatnya apabila ketersediaan Sumber Daya Alam tersebut tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah dan masyarakatnya (Lutpi. 2016).

Pembangunan pariwisata dalam perspektif sosial budaya mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga pembangunan pariwisata dilakukan secara menyeluruh, yaitu meliputi pembangunan aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dengan demikian masyarakat berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, tanpa merusak tatanan sosial, dan nilai budaya (Sirtha. 2010: 160).

Selama ini pembangunan yang dilakukan seringkali meminggirkan nilai-nilai adat dan budaya lokal setempat, sehingga banyak kearifan lokal yang hilang dan punah. Peminggiran kearifan lokal ini seringkali terjadi karena rencana pembangunan yang tidak memperhatikan aspek sosial budaya karena seringkali

dianggap tidak penting karena perspektif pembangunan yang hanya melihat aspek fisik semata, salah satunya adalah pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata selama ini seringkali dihadapkan berbagai masalah dengan masalah utama yang seringkali diabaikan adalah faktor manusia selain dari sumber daya alam yang potensial, namun jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni maka pembangunan pariwisata akan menjadi sia-sia (Nurdin. 2016).

Dalam kaitannya dengan sektor pariwisata, dilansir dari situs www.bukittinggikota.go.id, Kota Bukittinggi merupakan daerah di Provinsi Sumatera Barat yang menetapkan bidang kepariwisataan menjadi potensi unggulan daerah, di mana kondisi alam yang indah seperti Ngarai Sianok, diapit oleh Gunung Marapi dan Gunung Singgalang yang menjadikan kota Bukittinggi beriklim sejuk, belum lagi didukung faktor sejarah seperti Jam Gadang, Lobang Jepang, Benteng *Fort de Kock*, Museum Bung Hatta, menyebabkan Bukittinggi menjadi tujuan wisata.

Pada tanggal 11 Maret 1984, Kota Bukittinggi dicanangkan sebagai Kota Wisata dan Daerah Tujuan Wisata Utama di Sumatera Barat. Kemudian sesuai Perda Nomor : 25 tahun 1987, Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai daerah Pengembangan Pariwisata Sumatera Barat. Kota Bukittinggi saat ini mempunyai luas $\pm 25.239 \text{ km}^2$ terletak di tengah-tengah Sumatera Barat dengan ketinggian antara 909 M – 941 M dpl. Suhu udara berkisar $17,1^\circ \text{ C} - 24,9^\circ \text{ C}$, memiliki iklim udara yang sejuk. Posisinya yang strategis merupakan segitiga perlintasan menuju ke utara, timur dan selatan Sumatera (diakses 29 Oktober 2016, pukul 17.00).

Salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Bukittinggi adalah Desa Wisata Bukit Apit. Tempat ini agak berbeda dengan tempat wisata lainnya di Kota Bukittinggi, karena tidak hanya sekedar menonjolkan keindahan alam yang dimilikinya, namun lebih kepada suatu wilayah perkampungan dengan menampilkan kehidupan keseharian masyarakat di sekitar. Selain itu di Desa Wisata Bukit Apit ini juga terdapat banyak usaha menyangrai biji kopi yang merupakan budaya bagi masyarakat setempat yang sekaligus juga menjadi pendorong perekonomian warga karena telah diwariskan secara turun temurun. Kelurahan Bukit Apit Puhun ini memang sudah dikenal sebagai daerah pemasok bubuk kopi robusta yang memiliki aroma dan rasa khas, serta sudah dikenal pula di kawasan Nusantara hingga mancanegara¹.

Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah kota yang mengembangkan kawasan wisata baru di Kota Bukittinggi melalui Program PNPM Mandiri Pariwisata yaitu Desa Wisata Bukit Apit ini. Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.26/UM.001/MKP/2010, mengatakan bahwa PNPM Mandiri Pariwisata difokuskan pada pengembangan wilayah sasaran yang memiliki keterkaitan fungsi dan pengaruh dengan unsur daya tarik wisata berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia, maupun fasilitas usaha pariwisata dan industri kreatif yang menjadi penggerak aktivitas kepariwisataan di desa wisata.

¹ <http://www.antarasumbar.com/berita/169464/usaha-marandang-kopipendorong-ekonomi-warga-bukit-apit.html>, diakses 29 Oktober 2016 pukul 17.05

Pemerintah melakukan upaya-upaya seperti membangun fasilitas-fasilitas guna mendukung aktivitas wisatawan hingga 2015, seperti merenovasi kawasan *Janjang Saribu* yang menjadi wisata alam & utama bagi Desa Wisata Bukit Apit dan juga terbaru membangun Taman *Ngarai Maaram*. Selain dari itu pemerintah juga memberikan bantuan dana bagi beberapa *home industry* seperti kopi, kelompok pengolahan hasil pertanian, dan gerabah.

Seiring dengan peresmian Kelurahan Bukit Apit Puhun menjadi Desa Wisata Bukit Apit ², maka tidak terlepas dari masyarakat sekitar yang tinggal di kawasan tersebut. Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah guna mengembangkan pariwisata di Kelurahan Bukit Apit Puhun, tentunya diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung sehingga mampu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi keterlibatan masyarakat dalam membangun pariwisata belum terlihat sejak diresmikan, padahal jika melihat kasus pembangunan pariwisata pada daerah lainnya, masyarakat dapat melibatkan diri dengan aktif pada setiap langkah-langkah pembangunan pariwisata.

B. Rumusan Masalah

Dalam beberapa tahun kebelakang, terutama sejak tahun 1991 dicanangkan sebagai tahun kunjungan wisata, pemerintah dalam menggarap pariwisata bisa disebut serius dalam berbagai sektor. Pemerintah telah mengeluarkan dana ratusan

² Dikatakan Desa Wisata meskipun Bukit Apit merupakan sebuah kelurahan karena pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pariwisata mengikuti peraturan yang diberlakukan secara nasional oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melalui Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata, dan dalam peraturan dikatakan istilah Desa Wisata, bukan Kelurahan Wisata.

juta hingga milyaran rupiah guna membangun, memperbaiki, mengembangkan serta meningkatkan daerah kunjungan wisata melalui berbagai macam infrastruktur (Usman. 2004: 54).

Kota Bukittinggi merupakan salah satu daerah yang turut andil dalam menggarap pariwisata di wilayah regional mereka. Sebagai pemangku kepentingan, pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pariwisata dengan program pembangunan pariwisata menetapkan Kelurahan Bukit Apit Puhun menjadi Desa Wisata Bukit Apit pada tahun 2015³, dengan melakukan beberapa pembangunan berupa fisik dan bantuan PNPM Pariwisata kepada *home industry* guna menunjang keberadaan Desa Wisata Bukit Apit. Namun bukan serta merta setelah diresmikan menjadi Kampung Wisata Bukit Apit langkah pembangunan terhenti begitu saja, dibutuhkan kesadaran, perhatian, dan upaya dari masyarakat maupun pemerintah setempat dalam menjalankan dan mengawal dari program ini agar tujuan utama dari pembangunan ini dapat tercapai.

Untuk mewujudkan pariwisata yang berkembang dibutuhkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi atau dalam bahasa lainnya tanpa partisipasi masyarakat perkembangan pariwisata tidak dapat untuk dipastikan, demikian pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata. Tujuan utama dalam mengembangkan pariwisata yang melibatkan peran masyarakat secara aktif adalah untuk memberdayakan masyarakat, memperbaiki ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah setempat, karena secara teoritis semakin

³ Hasil wawancara dengan Bapak Iryandi (Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi) pada tanggal 2 Agustus 2017, pukul 10.18.

berperan aktif masyarakat dalam aktivitas pariwisata maka kesempatan kerja masyarakat juga semakin terbuka sehingga pendapatan masyarakat semakin meningkat (Lutpi. 2016).

Namun keberadaan potensi yang dimiliki Kelurahan Bukit Apit Puhun untuk menjadi desa wisata belum sepenuhnya dapat dikelola dan dimaksimalkan oleh pemerintah dan masyarakat dengan baik, selain dari itu pengaruh dari keberadaan Desa Wisata Bukit Apit justru belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat setempat, meski dikategorikan sebagai program yang berjalan baru beberapa tahun. Masyarakat juga terlihat tidak terlibat kedalam pembangunan pariwisata karena tidak ada upaya dari masyarakat dalam menggalakkan Desa Wisata Bukit Apit.

Berdasarkan pemikiran yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka penelitian ini ingin menjawab tentang “Apa yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Wisata Bukit Apit ? ”

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan penyebab minimnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Wisata Bukit Apit.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelaku pariwisata dan pemangku kepentingan, yaitu pemerintah dalam mengambil kebijakan yang dianggap perlu untuk mengoptimalkan dan menjadikan prioritas utama dalam mengelola pariwisata pada Desa Wisata Bukit Apit, serta menjadi acuan bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa wisata. Selain itu, diharapkan mampu memperkaya wawasan dan informasi tentang pembangunan pariwisata yang dilaksanakan, khususnya di Desa Wisata Bukit Apit untuk menunjang kegiatan pariwisata di Sumatera Barat khususnya sebagai alternatif destinasi wisata baru di Kota Bukittinggi.

2. Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi yang dapat bermanfaat bagi para peneliti lainnya, serta dapat memperkaya wawasan ilmiah bagi penelitian selanjutnya terutama berkaitan dengan pembangunan pariwisata dalam kajian Antropologi.

E. Tinjauan Pustaka

Berikut berbagai macam penelitian yang telah diangkat sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini:

Ni Luh Gede Ratnaningsih, I Gst. Agung Oka Mahagangga dalam jurnal yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pariwisata (Studi Kasus Di Desa Wisata Belimbing, Tabanan, Bali)” pada tahun 2015 pada Program Studi S1

Destinasi Pariwisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Jurnal Destinasi Pariwisata, Vol. 3 No 1, 2015. Dalam penelitian tersebut mendeskripsikan Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Bali yang memiliki potensi wisata yang cukup potensial. Dengan mengandalkan pariwisata sebagai sebuah sektor dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Adanya pengembangan pariwisata di suatu daerah diharapkan mampu untuk memberikan lapangan pekerjaan maupun peluang usaha untuk masyarakat luas guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pada umumnya.

Bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pengembangan desa wisata seperti : (1). Bentuk partisipasi yang mengawali aktifitas kepariwisataan yaitu masyarakat membuka usaha seperti rumah makan, restaurant dan pemandu wisata, (2). Bentuk partisipasi proses awal kepariwisataan yaitu masyarakat mulai melakukan musyawarah bersama untuk membicarakan mengenai keinginan mereka terhadap aktivitas pariwisata di desa mereka. (3). Bentuk partisipasi dalam perencanaan yaitu pembentukan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata), pembuatan sarana dan prasarana yang menunjang kepariwisataan dan perencanaan atraksi. (4). Bentuk partisipasi dalam pelaksanaan yaitu masyarakat terlibat secara langsung atas pelaksanaan semua perencanaan yang telah direncanakan seperti sarana dan prasarana yang menunjang kepariwisataan dan atraksi. (5). Bentuk partisipasi dalam pengembangan yaitu memelihara atraksi yang sudah ada maupun yang sedang direncanakan, promosi melalui website, baliho ataupun brosur. (6). Bentuk partisipasi dalam evaluasi program yaitu masyarakat belum bisa menilai

sampai mana perencanaan yang diprogramkan membuahkan hasil karena belum berjalannya badan pengelola secara maksimal.

Kemudian masih dari Universitas Udayana oleh **Andryano Febrian Bambar dan I Putu Anom** yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Pantai Pandawa, Desa Kutuh, Kuta Selatan, Badung”, pada tahun 2016 pada Program Studi S1 Destinasi Pariwisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Jurnal Destinasi Pariwisata, Vol. 4 No 2, 2016. Menjelaskan tentang Keberhasilan masyarakat Desa Kutuh dalam membangun pariwisata di Pantai Pandawa di tempat tersebut tidak terlepas dari partisipasi masyarakat setempat baik dalam mendukung maupun secara langsung mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata di Pantai Pandawa.

Partisipasi masyarakat Desa Kutuh terlihat dari 3(tiga) aspek penting partisipasi yaitu : **(a).Dalam Pengambilan Keputusan** Masyarakat Desa Kutuh diberi kesempatan untuk memberi masukan dan mengkritisi aktivitas pariwisata yang sudah berjalan melalui kegiatan evaluasi yang dilakukan sebulan sekali dan kegiatan *gathering pandawa family*. Dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah *interaktif*. **(b).Dalam Pelaksanaan Program Pariwisata.** Masyarakat Desa Kutuh berpartisipasi dalam pelaksanaan program kerja di Pantai Pandawa guna mengembangkan kualitas pariwisata di Pantai Pandawa. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program terlihat dalam, pengembangan fasilitas di Pantai Pandawa, promosi pariwisata, dan investasi pariwisata. Dalam pengembangan fasilitas, bentuk partisipasi masyarakat bersifat *self mobilization*, masyarakat Desa Kutuh berinisiatif menyediakan sumber daya

(tenaga kerja dan modal), sedangkan dalam promosi pariwisata bersifat *intensif*, masyarakat Desa Kutuh mendapat upah setelah ikut berpartisipasi dalam kegiatan promosi, seperti pembuatan iklan di Pantai Pandawa, festival, dan pembuatan FTV. Dan dalam investasi pariwisata, bentuk partisipasi masyarakat adalah *self mobilization*. (c). **Dalam Pembagian Hasil dari Program Pariwisata** Masyarakat Desa Kutuh juga mendapat keuntungan dari kegiatan pariwisata di Pantai Pandawa. Keuntungan itu diperoleh karena masyarakat diberi kebebasan untuk mengembangkan usaha atau berinvestasi di Pantai Pandawa, selain itu juga hasil dari kegiatan pariwisata di pantai Pandawa juga digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas-fasilitas pariwisata di Pantai Pandawa dan pembangunan Desa.

Kemudian jurnal dari **Hakkiatul Lutpi** (2016) yang berjudul “Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Pantai di Kecamatan Jerowaru” Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Vol: 8 Nomor: 3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata pantai, dan upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata pantai di Kecamatan Jerowaru. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan pariwisata pantai di Kecamatan Jerowaru sebanyak 12.320 jiwa Penduduk Desa Ekas Buana, Kwang Rundun, Seriwe, dan Sekaroh. Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling* sebanyak 139 orang terdiri dari masyarakat kelompok sadar wisata, pemilik dan karyawan

hotel, penyedia jasa perahu jukung, jasa transportasi (ojek), jasa pemandu wisata (*guide*), dan penjual makanan serta minuman.

Data dikumpulkan dengan metode wawancara terstruktur dan observasi non-partisipan, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis Rating/Peringkat dan teknis analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata pantai di Kecamatan Jerowaru masih rendah, terlihat dari nilai/skor terhadap keseluruhan dari ke-empat indikator yang digunakan yaitu sebesar 0,89. Upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata pantai adalah dengan membuat program kelompok sadar wisata (*pokdarwis*), melakukan jambore kelompok sadar wisata (*jambore pokdarwis*), dan berupaya melakukan pembangunan fisik pariwisata pantai seperti sarana dan prasarana pariwisata.

Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh **Emily Höckert** (2009), yang mengangkat judul "*Socio-cultural Sustainability of Rural Community-Based Tourism, Case Study of Local Participation in Fair Trade Coffee Trail, Nicaragua*" melakukan penelitian secara kualitatif dengan pendekatan etnografi di daerah *Fair Trade Coffee Trail* San Ramón, Nicaragua. Penelitian ini bertujuan mengangkat studi pariwisata budaya dan studi pengembangan yang menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan tidak akan bisa tanpa kebijakan sosial dan partisipasi aktif dari masyarakat lokal. Penelitian ini menganalisis tantangan dan kemungkinan sosial budaya dari penerapan pengembangan pariwisata pedesaan pada masyarakat lokal yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani kopi dan mempromosikan partisipasi masyarakat lokal. Hasil penelitian ini

mendukung asumsi bahwa pariwisata berbasis masyarakat pedesaan sangat potensial untuk mendukung pemberdayaan di masyarakat, khususnya membuka lapangan kerja baru bagi pemuda dan para wanita yang bertanggung jawab terhadap akomodasi wisata di daerah mereka. Masyarakat bisa menjadi mandiri, memiliki pengetahuan dan *skill* baru serta kebanggaan atas budaya mereka. Namun kelemahannya adalah koordinasi dengan pihak pengembang pariwisata yang masih belum berjalan baik akibat kurangnya promosi terhadap pemberdayaan sosial di masyarakat.

Ada juga penelitian oleh **Sumalee Nunthasiripon** (2015), yang berjudul *Application of Sustainable Tourism Development to Assess Community Based Tourism Performance*. Melakukan evaluasi terhadap kinerja (penerapan) pariwisata berbasis masyarakat di sana secara kualitatif dengan menggunakan 8 (delapan) informan kunci melalui wawancara pada tokoh masyarakat, pemerintah daerah, masyarakat yang terlibat dengan kegiatan pariwisata, dan orang-orang akademik di kawasan Koh Kred, Provinsi Nonthaburi, Thailand. Penelitian ini mengangkat penilaian pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dengan menjelaskan bahwa dasar konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat itu terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa tujuan dari pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas dengan keberlanjutan ekonomi, penilaian keaslian sosial budaya pada masyarakat lokal, dan perlindungan terhadap lingkungan.

Terakhir dari **Ahmad Nawawi** yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis” tahun 2013, Magister Kajian Pariwisata Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Volume 5, Nomor 2, Agustus 2013 (103 - 109). Penelitian ini memiliki fokus utama dalam menilai tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis, Kabupaten Bantul. Analisis data dilakukan dengan memahami dan merangkai data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Tujuannya adalah untuk membuktikan respon masyarakat terhadap pariwisata dan tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan pantai Depok dengan melihat alasan-alasan yang sudah diberikan. Hasil analisa dan interpretasi data menyebutkan bahwa pengelolaan wisata pantai Depok secara administratif masih disatukan oleh Pemda Kabupaten Bantul dengan kawasan wisata lain yang ada di desa Parangtritis. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata Pantai Depok dibuktikan dengan mendirikan Koperasi Wisata Mina Bahari 45 Pantai Depok. Rekomendasi penelitian adalah peningkatan partisipasi masyarakat melalui: penataan dan pengaturan tempat berdagang, letak warung makan dan pengelola atraksi wisata.

Dari beberapa hasil penelitian yang sudah dikemukakan di atas, ada kesamaan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu mengkaji tentang pembangunan pariwisata melalui desa wisata, namun dari penelitian tersebut telah memperlihatkan pengaruh dari desa wisata bagi masyarakat, hal tersebut berdasarkan dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat berupa perekonomian, terbukanya lapangan pekerjaan. Berbeda dari penelitian diatas pada penelitian kali ini peneliti ingin melihat

pembangunan pariwisata melalui desa wisata, namun keberadaan pariwisata belum signifikan terhadap kehidupan serta perekonomian masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Pada saat sekarang ini banyak wilayah yang telah mengembangkan industri pariwisata sebagai salah satu andalan bagi pendapatan suatu wilayah, masing-masing daerah menyuguhkan ciri khas dan potensi yang menarik untuk dikunjungi. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Menurut Pitana dan Diarta (2009), pariwisata merupakan konsep yang sangat multidimensional. Tak bisa dihindari bahwa beberapa pengertian pariwisata dipakai oleh para praktisi dengan tujuan dan perspektif yang berbeda sesuai tujuan yang ingin dicapai.

Guna mendukung keberadaan pariwisata pada suatu daerah, dilakukan pembenahan dan pembangunan fasilitas guna kenyamanan pengunjung. Istilah pembangunan tidak bisa dilepaskan dari istilah modernisasi, maka dari itu dalam usaha pembangunan terdapat memodernisasikan suatu masyarakat atau negara. Konsep pembangunan mempunyai pengertian yang kompleks, singkatnya pembangunan sebagai usaha yang dilakukan untuk merubah kondisi masyarakat kepada keadaan yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup, taraf hidup serta martabat manusia (Effendi, dan Zamzami. 2007: 4-5). Dalam hal ini pemerintah telah melakukan serangkaian pembangunan, baik itu seperti pembangunan berupa

fisik, seperti pemugaran yang dilakukan terhadap *Janjang Saribu*, Taman *Ngarai Maaram*, gallery Kopi, dan upaya pembangunan dalam bentuk bantuan dana.

Marzali (2009: 55-56) menyebutkan bahwa konsep “pembangunan” pada mula dan dasarnya diacukan kepada pengertian pembangunan ekonomi. Dari sudut ilmu ekonomi, pembangunan berarti suatu proses di mana *real per capita income* dari suatu negara meningkat dalam suatu masa panjang, dan dalam masa yang bersamaan jumlah penduduk yang “di bawah garis kemiskinan” tidak bertambah, dan distribusi pendapatan tidak makin senjang (Meier 1989). Sedangkan dalam ilmu sosial, “pembangunan” sering kali diartikan sangat umum, yaitu “perubahan sosiokultural yang direncanakan” (Arensberg dan Niehoff 1964). Secara garis besar usaha pembangunan ini mengandung beberapa peringkat keputusan, yaitu : penentuan tujuan pembangunan, pemilihan strategi pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan. Pada kasus ini pemerintah membangun kawasan Bukit Apit dengan segala potensi dan daya tarik yang dimiliki daerah ini menjadi Desa Wisata.

Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Permen Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor : PM.26/UM.001/MKP/2010). Menurut Soemarno ⁴, penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain sebagai berikut :

1. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.

⁴ Dalam situs <http://mamo.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/Desa-wisata.doc>

2. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
4. Keamanan di desa tersebut terjamin.
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
6. Beriklim sejuk atau dingin.
7. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas

Selanjutnya Soemarno juga mengatakan agar pembangunan desa wisata berjalan sukses, perlu ditempuh berbagai upaya diantaranya Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Kemitraan / kerjasama, Kegiatan Pemerintahan di Desa, Promosi, Festival / Pertandingan, Membina Organisasi Warga, Kerjasama dengan Universitas.

Dalam upaya membangun desa wisata, diperlukan langkah yang berlandaskan dengan budaya, nilai, dan norma yang sesuai dengan masyarakat setempat, sehingga pembangunan dapat berjalan beriringan dengan kebudayaan yang masyarakat miliki. Kebudayaan dalam Koentjaraningrat (2009: 144) adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal tersebut berarti hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, yaitu hanya beberapa tindakan naluri, refleks, dan beberapa tindakan membabi buta.

Kebudayaan memiliki peranan dalam seseorang dalam bertindak melalui cara berfikir yang dimiliki oleh suatu masyarakat, dalam pembangunan pariwisata dibutuhkan keaktifan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta (jika ada), dan masyarakat sendiri, hal tersebut dikarenakan adanya gerakan bersama dan tanggung jawab dari berbagai pihak dapat dimaksimalkan. Hal tersebut dikarenakan peran pemerintah saja tidak cukup guna pengembangan desa wisata, akan tetapi peran aktif masyarakat dalam berpartisipasi di desa bersangkutan juga sangat diperlukan dalam usaha tersebut. Kerjasama yang baik akan memperlancar pengembangan desa wisata di daerah tersebut, sehingga pengembangan desa wisata melibatkan partisipasi beberapa pihak dan lapisan masyarakat.

Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Susantyo. 2007) mengemukakan pengertian partisipasi dalam hubungannya dengan proses pembangunan, yaitu:

1. Keterlibatan dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pembanguan yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini berlangsung bukan saja dalam proses politik, tetapi juga dalam proses sosial yaitu hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat;
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam bentuk sumbangan dalam mobilisasi pembiayaan pembangunan, kegiatan produksi yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan; dan
3. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Menurut Keith Davis (dalam Murniati. 2008: 16) yang bukunya berjudul "*Human Relational Work*" mengatakan bahwa "*participation is defined as mental and emotional involment of a person in a group situation which ecourages him to contribute to group goals and share resposibility in them*" - partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Masyarakat dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari bahasa latin *socius*, berarti "kawan". Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar bahasa Arab yaitu *syaraka* yang berarti "ikut serta, berpartisipasi". Dengan demikian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling "bergaul", atau dengan istilah ilmiah, saling "berinteraksi" (Koentjaraningrat. 2009: 115-116). Dalam pengertian lainnya, masyarakat dapat juga dipahami sebagai sekelompok besar orang-orang yang hidup bersama secara terorganisasi, membuat keputusan tentang bagaimana melakukan sesuatu dan berbagi pekerjaan yang perlu dilakukan⁵. Sedangkan menurut Mac Iver dan Page masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasankebebasan manusia (Murniati. 2008: 19).

⁵<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/society> diakses 20-02-2017 pukul 10.35

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam perspektif penelitian kualitatif terdapat beberapa metode pendekatan yang dapat dipakai, salah satunya yaitu metode penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Hal ini berarti para peneliti kualitatif mempelajari benda-benda yang di dalam konteks alaminya, yang berupaya untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia (peneliti) kepadanya (Denzin dan Lincoln. 2009: 2).

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada pada masyarakat, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin. 2007: 68). Dengan demikian, peneliti dapat menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif sehingga pada akhirnya dapat mengetahui penyebab minimnya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat guna mendukung keberadaan desa wisata pada kelurahan Bukit Apit Puhun.

2. Lokasi Penelitian

Wilayah atau daerah yang menjadi lokasi penelitian dilakukan di Desa Wisata Bukit Apit Kelurahan Bukit Apit Puhun yang terletak di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi. Pemilihan dari lokasi ini didasarkan atas informasi bahwa keberadaan desa wisata yang dibangun oleh pemerintah belum berpengaruh terhadap kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Bukit Apit Puhun.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain, tentang suatu kejadian atau hal lain kepada peneliti (Afriзал. 2014: 139). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah jenis *purposive sampling*, yaitu sebelum melakukan penelitian ditetapkan dulu kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti juga telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan (Afriзал. 2014: 140). Unit analisis penelitian ini adalah individu yang telah ditetapkan sebagai informan yaitu orang-orang pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintahan kota maupun pihak kelurahan Bukit Apit Puhun.

Kemudian peneliti menentukan informan yang bisa dikategorikan sebagai informan kunci dan informan biasa. Informan kunci dapat dikatakan sebagai mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai

informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian serta yang terlibat langsung dalam permasalahan penelitian, adapun yang menjadi informan kunci adalah pihak dari tokoh masyarakat Desa Wisata Bukit Apit, pedagang, aparat desa, pemuda dan masyarakat umum. Sedangkan informan biasa yaitu pihak / orang yang memiliki pengetahuan umum dalam kegiatan atau orang yang tidak terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti, adapun yang diharapkan untuk menjadi informan biasa yaitu Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi, pihak Kelurahan Bukit Apit Puhun, dan pihak Pokdariwis Desa Wisata Bukit Apit.

Tabel 1.
Daftar Nama Informan Kunci

No	Nama	Umur	Jabatan
1	Bapak T	54 tahun	Tokoh Masyarakat Desa Wisata Bukit Apit, pedagang Kopi
2	Bapak S	71 tahun	Tokoh Masyarakat Desa Wisata Bukit Apit, Mantan Ketua LPM Kelurahan Bukit Apit Puhun
3	Ibu Z	57 tahun	Pedagang (Kelompok Kuliner)
4	Bapak A	50 tahun	Pedagang (Kelompok Kopi)
5	Ibu Y	63 tahun	Pedagang (Kios di <i>Janjang Saribu</i>)
6	Bapak RI	53 tahun	Aparat Desa (Ketua RW 4), kerajinan garabah
7	Bapak X	66 tahun	Masyarakat non-kelompok , pemilik kios fotocopy
8	Bapak E	43 tahun	Perwakilan Pemuda

Tabel 2.
Daftar Nama Informan Biasa

No	Nama	Umur	Jabatan
1	Bapak IP	55 tahun	Kepala Bagian Destinasi, Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi
2	Ibu D	56 tahun	Sekretaris Kantor Lurah Bukit Apit Puhun
3	Ibu F	44 tahun	Sekretaris Pokdarwis Desa Wisata Bukit Apit

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi.

Dalam teknik ini peneliti perlu mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan, merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan sendiri atau merasakan sendiri (Afrizal. 2014: 21). Jadi dapat dikatakan observasi proses dimana peneliti terjun langsung ke lapangan Desa Wisata Bukit Apit untuk melihat kondisi langsung dan memastikan bahwa apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam proses penelitian di lapangan yang telah dilakukan beberapa bulan kemarin, teknik observasi ini sangat membantu dalam mengumpulkan data penelitian. Beberapa data yang menjadi tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat ini dapat terkumpul dengan menerapkan metode pengamatan secara langsung oleh

peneliti. Melalui observasi langsung ini peneliti dapat menyajikan data secara umum mengenai topik permasalahan sesuai dengan penelitian.

b. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, lazim dipergunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Konsep wawancara mendalam merupakan padanan Bahasa Indonesia dari bahasa Inggris, *in-depth interviews*, merupakan suatu wawancara tanpa alternatif jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang informan. Wawancara mendalam dilakukan dengan mendalami informasi dari seorang informan dan oleh sebab itu perlu dilakukan berulang kali dengan seorang informan (Afrizal, 2014: 135-136). Teknik ini digunakan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang sebelumnya telah disusun agar jawaban yang didapatkan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Selain dari itu, melalui wawancara mendalam agar peneliti mendapatkan data dan informasi secara langsung dan jelas dari pelaku sendiri dalam berpartisipasi membangun Desa Wisata Bukit Apit. Dalam hal ini dibutuhkan alat bantu dalam melakukan wawancara mendalam berupa rekaman suara melalui *handphone* untuk menghindari tidak tercatatnya beberapa informasi yang diungkapkan oleh informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengkaji sumber-sumber tertulis dan kondisi lapangan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi karena untuk melengkapi data yang

didapat melalui wawancara maupun observasi. Adapun sumber yang penulis gunakan dalam membantu penulisan adalah buku profil daerah, buku PNPM Pariwisata, dan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian serta dokumentasi pribadi.

5. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif tidak suatu proses kuantifikasi data, melainkan suatu proses pengolahan data mentah berupa penuturan, perbuatan, catatan lapangan dan bahan-bahan tertulis yang lain yang memungkinkan peneliti untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan pokok persoalan yang diteliti. Luaran analisis data bukan angka, bukan signifikansi hubungan yang dinyatakan dengan angka, bukan pula distribusi, melainkan kategori atau klasifikasi atau tipologi. Jadi analisis data penelitian kualitatif yaitu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Aktifitas peneliti adalah menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok - kelompok (Afriзал. 2014: 175-176).

Dalam menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari penelitian di lapangan, peneliti menggunakan analisis model interaktif (*interactive model analysis*) yang dikemukakan oleh Miles dan

Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1994), analisis model interaktif didefinisikan sebagai aktivitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus (berulang kali) sampai tuntas, sehingga data yang didapatkan sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data model interaktif data kualitatif terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Berikut penjelasan ketiga komponen analisis model interaktif tersebut:

a. Reduksi Data

Kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul. Komponen ini mempunyai tiga tahap: yaitu pertama, editing, pengelompokan dan meringkas data. Kedua, peneliti menyusun catatan atau memo yang berkenaan dengan proses penelitian sehingga ditemukan tema, kelompok, dan pola-pola data. Ketiga, peneliti menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan berkenaan dengan tema, pola atau kelompok data yang bersangkutan.

b. Penyajian Data

Proses yang menyajikan data penelitian berupa kategori atau pengelompokan dalam sebuah kesatuan. Hasil akhir penelitian melalui kalimat atau berupa matrik dan diagram yang disusun secara sistematis dan logis agar mudah untuk dipahami. Oleh sebab itu sangat diperlukan penyajian data yang jelas dan sistematis dalam membantu peneliti menyelesaikan pekerjaannya.

c. Penarikan Simpulan (Verifikasi)

Pada tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan dari temuan data. Selanjutnya kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung guna memperoleh kebenaran tentang sebuah data atau informasi. Secara keseluruhan, data dan informasi yang diperoleh akan diuji kebenarannya, kekuatannya, serta kecocokan untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan dengan mengecek lagi kesahihan interpretasi.

6. Proses Penelitian

Pada awalnya penelitian ini dimulai dengan observasi awal guna meninjau kondisi serta keadaan lapangan tempat dimana peneliti mengambil lokasi untuk penelitian. Sebenarnya lokasi dari tempat penelitian ini tidak jauh dari rumah peneliti dan sejak lama peneliti memang mengetahui letak lokasi ini, namun belum mengetahui secara jelas keadaan disini karena sebelumnya tidak memiliki kepentingan apapun sehingga dilakukan observasi awal guna kepentingan penelitian yang akan dijalani. Setelah melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan cara berdialog dengan beberapa anggota masyarakat dari berbagai latar belakang, peneliti menemukan topik yang akan diangkat untuk diteliti. Pada awal bulan November 2016 peneliti merancang proposal dan singkat cerita berjalan proses bimbingan dengan 2 dosen pembimbing hingga pertengahan bulan Maret 2017. Setelah berkas proposal peneliti ajukan dan mendapat tanda tangan ACC dari kedua dosen pembimbing, dan tepat tanggal 13 April 2017 peneliti menempuh ujian seminar proposal.

Dikarenakan beberapa bagian proposal harus diperbaiki, sehingga peneliti melakukan bimbingan bersama dosen pembimbing 1 dan beriringan dengan pengurusan perizinan penelitian ke bagian Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya setelah surat perizinan selesai dengan dikeluarkannya surat izin dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Andalas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1151/UN16.08.WD I/PP/2017, Hal : Izin Penelitian. Waktu penelitian 2 bulan terhitung bulan April hingga Juni 2017, dengan lokasi penelitian di Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. Setelah surat perizinan dari fakultas keluar, peneliti keesokan harinya menuju KESBANGPOL Kota Bukittinggi untuk menyerahkan surat perizinan, pihak KESBANGPOL sendiri mengkonfirmasi bahwa surat perizinan baru dapat keluar 1 minggu kemudian. Setelah 1 minggu surat KESBANGPOL keluar, peneliti melanjutkan mengurus surat ke Dinas Pariwisata Bukittinggi, lalu diteruskan kepada pihak Kantor Kelurahan Bukit Apit Puhun, serta Capil Kota Bukittinggi demi mendapatkan data demografi lokasi penelitian.

Saat memasukkan surat izin penelitian di Kantor Lurah Bukit Apit Puhun, peneliti menanyakan siapa saja pihak-pihak yang dapat diwawancarai terkait penelitian, kebetulan yang berkesempatan saat itu Sekretaris Kelurahan yaitu Ibu Desmiwati dikarenakan Lurah saat ini baru diangkat sehingga belum banyak mengetahui kawasan Desa Wisata Bukit Apit. Setelah mendapatkan siapa saja yang kira-kira dapat diwawancarai, peneliti kembali ke Padang guna bimbingan perbaikan hasil dari seminar proposal. Meskipun tertanggal bulan April dalam surat yang dikeluarkan, penelitian baru dapat peneliti lakukan pada awal bulan Agustus

dikarenakan beberapa kendala proses pembuatan pedoman wawancara, revisi, serta beberapa masalah pribadi.

Awal Agustus peneliti berkoordinasi kembali dengan pihak kelurahan memberi tahu bahwa peneliti akan segera turun ke lapangan bertemu dengan pihak-pihak yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah bertemu dengan informan, diantaranya tokoh masyarakat, pedagang (kopi dan kuliner), pemuda, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan peneliti kepada informan serta memberitahu bahwa yang peneliti lakukan saat ini sudah meminta izin persetujuan pihak Kesbangpol Bukittinggi hingga pihak kelurahan agar informan tidak curiga dan ragu-ragu dalam memberikan informasi yang peneliti butuhkan.

Selama proses penelitian, peneliti tidak menginap di rumah informan atau lokasi penelitian berada, melainkan peneliti barulang setiap hari dari rumah peneliti sendiri yang jaraknya \pm 8 Km saja, jadi peneliti hanya mendatangi informan-informan ke rumah masing-masing dengan bertanya kepada masyarakat terkait alamat para informan. Pada mulanya waktu yang dibutuhkan peneliti dalam mengumpulkan data selama 2 minggu terhitung sejak awal Agustus, setelah itu penulis mulai menganalisis data-data yang didapatkan melalui langkah-langkah yang peneliti pakai yaitu reduksi data dimana pemilihan data yang dianggap penting dan tidak penting, selanjutnya mengelompokkan data yang telah dipilah tadi, dan terakhir penarikan kesimpulan. Proses bimbingan terus dilakukan dengan dosen pembimbing, pada mulanya bimbingan peneliti lakukan dengan dosen pembimbing 1 terlebih dahulu hingga 5 kali, setelah itu baru proses bimbingan selanjutnya bersama dosen pembimbing 2.

Dalam upaya mengumpulkan data dan informasi selama penelitian, terdapat suka dan dukanya peneliti rasakan selama berada di lapangan. Seperti sukanya peneliti rasakan adalah pada umumnya informan menerima keberadaan peneliti sehingga terciptanya hubungan yang baik, selain itu keuntungan yang peneliti dapatkan selama di lapangan adalah akses menuju lokasi penelitian dengan rumah peneliti dekat, sehingga peneliti merasa tidak canggung karena secara wilayah masih berada dalam kawasan Kota Bukittinggi. Sedangkan kendala (duka) yang peneliti rasakan yaitu tidak sedikit juga informan yang dapat dimintai waktu karena beraktivitas sehingga membutuhkan siasat guna mendapatkan waktu yang bagus untuk dapat mewawancarai informan. Selain itu terkadang ditemukan juga beberapa jawaban yang kurang memuaskan dari informan dikarenakan tidak sesuai dengan pertanyaan.

Selain itu juga beberapa kesempatan terkendala dengan adanya kehadiran pihak ketiga (seperti tamu informan yang datang dan adanya telpon masuk) sehingga mengganggu konsentrasi informan dalam menjelaskan mengenai topik permasalahan sehingga menghambat proses wawancara itu sendiri.